

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat yang tinggal di daerah tambang mengenai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir dan batu bantaran Sungai Progo Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara serta observasi dan melalui dokumen atau literatur pendukung untuk data sekunder.

Aktivitas penambangan pasir dan batu di bantaran Sungai Progo dengan menggunakan alat berat secara perseorangan maupun perusahaan dengan dalih normalisasi aliran sungai pasca Erupsi Gunung Merapi berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 167/Kep.KDH/A/2012 perubahan atas Nomor 284/Kep.KDH/A/2011 tentang Normalisasi Aliran Sungai Pasca Erupsi Gunung Merapi yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman. Peraturan tersebut disalahpahami oleh berbagai pihak, yang memunculkan geliat pertambangan pasir tidak terkendali.

Salah satu contoh penambangan pasir dan batu di bantaran Sungai Progo yang menimbulkan penolakan masyarakat terjadi di Desa Sendangagung khususnya daerah Wiyu, Pundak Wetan dan Jomboran Yogyakarta. Peneliti menemukan masyarakat menolak adanya penambangan pasir dan batu di bantaran Sungai Progo karena masyarakat mempunyai persepsi bahwa perusahaan tambang mengambilnya dengan alat berat tanpa memperhatikan kelestarian tanah dan lingkungan yang mengakibatkan terjadi degradasi lahan, longsor, pencemaran udara, pencemaran air. Disamping itu masyarakat mempertanyakan legitimasi pemerintah mengeluarkan izin tambang yang tidak transparan.

Kata kunci: Akuntansi Lingkungan, Aktivitas Pertambangan, Persepsi, dan Legitimasi

ABSTRACT

This research aims to determine the perceptions of people living in mining areas regarding the impacts of sand and stone mining activities on the banks of the Yogyakarta Progo River. This research uses a qualitative type with a case study method. Primary data collection is carried out by interviews and observations and through supporting documents or literature for secondary data.

Sand and stone mining activities on the banks of the Progo River using heavy equipment by individuals and companies under the pretext of normalizing river flow after the eruption of Mount Merapi based on Sleman Regent's Decree Number 167/Kep.KDH/A/2012 amendment to Number 284/Kep.KDH/A /2011 concerning Normalization of River Flows After the Eruption of Mount Merapi issued by the Regent of Sleman. This regulation was misunderstood by various parties, which gave rise to uncontrolled sand mining.

One example of sand and stone mining on the banks of the Progo River which caused community rejection occurred in Sendangagung Village, especially the Wiyu, Pundak Wetan and Jomboran areas of Yogyakarta. Researchers found that the community rejects sand and stone mining on the banks of the Progo River because the community has the perception that mining companies take it with heavy equipment without paying attention to soil and environmental sustainability, which results in land degradation, landslides, air pollution and water pollution. Apart from that, the community questions the legitimacy of the government in issuing non-transparent mining permits.

Keywords: Environmental Accounting, Mining Activities, Perception, and Legitimacy